

Implementasi Standar Pengelolaan untuk Peningkatan Mutu Layanan Pembelajaran

The Implementation of Management Standard for Improving the Quality of Learning Services

**Panji Pratama¹, Hendra Yulianto², Ujang Cepi Berlian³
& Yosali Iriantara⁴**

¹STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

²SMA 3 Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

³Universitas Islam Nusantara, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

⁴Universitas Islam Nusantara, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

¹*telagaremunggai@gmail.com*, ²*apihsekar163n@gmail.com*,

³*ujangcepiberlian@yahoo.co.id*, ⁴*yosaliriantara@uninus.ac.id*.

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada segenap lini kehidupan, tidak terkecuali pendidikan. Lembaga pendidikan terpaksa mengubah kegiatan belajar mengajar dari konvensional ke daring. Pemerintah mengonstruksi regulasi agar mutu pelayanan pembelajaran sesuai tujuan nasional pendidikan, termasuk dalam menghadapi kondisi darurat seperti Pandemi COVID-19. Penelitian ini mencoba menganalisis penerapan instrumen akreditasi Standar Pengelolaan sebagai kajian mutu pelayanan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan sampel sekolah yang digunakan adalah dua yakni SMAN 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi dan SMA 3 Pasundan Bandung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa dokumen KTSP dan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Berdasarkan hasil analisis melalui instrumen akreditasi standar pengelolaan pada dua sekolah yang diteliti didapatkan poin yang cukup besar yakni SMA Negeri 1 Nagrak: 96 poin dan SMA 3 Pasundan: 95 poin, sehingga bisa dikatakan sekolah-sekolah tersebut mendapatkan poin yang maksimal.

Kata Kunci: Akreditasi, Mutu Layanan Pembelajaran & Standar Pengelolaan

Abstract

The Covid-19 pandemic has a major impact on all lines of life, including education. Formal education institutions are forced to change teaching and learning activities from conventional to online. The government has constructed regulations so that the quality of learning services is in line

with the national goals of education, included in the face of emergency conditions such as the COVID-19 Pandemic. This research aims to analyze the application of the management standard accreditation instrument as a study of the quality of learning services during the COVID-19 pandemic. This research used a descriptive-qualitative method with a sample of two schools, namely Public Senior High School 1 Nagrak, Sukabumi Regency and Senior High School 3 Pasundan Bandung. The data used in this research are qualitative data in the form of KTSP documents and the results of interviews with the Vice Principal of Curriculum. Based on the results of the analysis through the accreditation instrument of management standard at the two schools founded that the points were quite large, namely Public Senior High School 1 Nagrak: 96 points and Senior High School 3 Pasundan: 95 points, so it can be said that these schools got the maximum points.

Keywords: Accreditation, Quality of Learning Services & Management Standards

I. PENDAHULUAN

Satu hal yang dapat digeneralisasi dari pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah upaya sistematis untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat merefleksi potensi dirinya sendiri. Kelak, peserta didik diharapkan dapat memiliki kecerdasan spiritual, keunggulan akhlak, kemampuan berpikir, serta keterampilan mumpuni. Hal tersebut sesuai pula dengan cita-cita UNESCO yakni agar setiap individu manusia

mempunyai bekal yang cukup untuk hidup dan berdaya.

Meski sebetulnya konsep sistem pendidikan bisa jadi berkembang dan berubah, tetapi tentunya pendidikan merupakan sebuah tatanan yang komprehensif dari masa ke masa. Baik itu sesuai dengan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang ada di masa kini, maupun tuntutan yang mungkin ada di masa depan.

Sayangnya, cita-cita yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak serta merta sesuai dengan keadaan di lapangan. Mutu pendidikan Indonesia masih dianggap

tergolong ke dalam level yang rendah. Asumsi ini diperoleh dari kajian input dan output dari pendidikan itu sendiri yang disebut-sebut masih jauh dari kata “profesional”. Maka dari itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan sebuah tata kelola pendidikan yang visioner dan terpadu (Sallis, 2006).

Dari bahasan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, dapat diurai bahwa masalah terbanyak berada pada tataran atau jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menurut Mulyasa (2012) bahwa masalah-masalah tersebut berkaitan dengan faktor guru, kepala sekolah, dan pengawas, karena ketiga figur tersebut merupakan kunci yang menentukan serta menggerakkan berbagai komponen dan dimensi sekolah yang lain. Dengan demikian, faktor paling krusial yang harus digarisbawahi adalah mengenai Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Maka dari itu, penting dalam artikel ini, peneliti menggarisbawahi tentang upaya perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Manusia melalui strategi

yang berkenaan dengan Standar Pengelolaan Lembaga Pendidikan di antaranya: perbaikan kurikulum, pengembangan sistem evaluasi pendidikan mutakhir, peningkatan sarana dan prasarana, pengadaan materi ajar, dan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan.

Selain itu, mutu pendidikan sekolah yang baik pun bergantung pada manajemen atau pengelolaan dari kepala sekolahnya. Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi (presiden) dianggap sebagai pelaku utama yang berperan penting dalam pelaksanaan perbaikan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini sesuai dengan apa yang Kerr (1999) katakan bahwa *'the president in the multiversery, is leader, educator, creator, initiator, wielder of power pump, he is also office holder, caretaker, inheritor, consensus seeker, persuader, bottleneck, but he is mostly mediator'*.

Selanjutnya, untuk mencapai mutu yang terbaik, diperlukan proses pendidikan yang sangat bergantung pada pengelolaan pendidikan yang

sinergis dari semua konten dalam pendidikan. Dengan demikian, lembaga pendidikan yang bermutu adalah lembaga yang pengelolaannya efisien, efektif, profesional, dan terpadu. Dengan kata lain sekolah bermutu adalah sekolah yang dapat memberdayakan segenap potensi internal sekolah dan *stakeholders* untuk bersama-sama ikut menyumbang pikirannya dalam proses pengelolaan sekolah itu sendiri.

Konsep sekolah bermutu tersebut sebetulnya telah distandarisasi dalam sebuah sistem yang disebut Standar Nasional Pendidikan (SNP). Melalui terbitnya PPRI No. 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebuah sekolah diharapkan dapat terpacu untuk mengembangkan budaya terpadu sekolah dalam rangka terjaminnya proses pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dan berprestasi.

Selain regulasi tersebut, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 ayat

(1) disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan yang meliputi kurikulum, proses, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Selanjutnya, pada pasal yang sama ayat (2) disebutkan pula bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Di lain sisi, munculnya bencana pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019, berdampak besar pada pengelolaan setiap lini kehidupan, tidak terkecuali dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia pada akhirnya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai strategiantisipasi penyebaran virus COVID-19. Sayangnya, hal tersebut berpengaruh besar terhadap aktivitas belajar mengajar. Penutupan secara luas sekolah, mengakibatkan sistem pembelajaran harus berubah dari tatap muka ke metode jarak jauh.

Berbagai cara pun dilakukan sekolah untuk menjangkau peserta didik dari jarak jauh, seperti memaksimalkan penggunaan *Learning Management System*, walaupun masih dengan segala keterbatasan.

Sampai akhir tahun 2020 ini, layanan pembelajaran harus menggunakan sistem jarak jauh. Jika dihitung, telah lebih dari 10 bulan, sekolah-sekolah di Indonesia memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Namun demikian, masih banyak keluhan yang disampaikan baik oleh peserta didik, pendidik, maupun masyarakat (orang tua) terhadap keefektifan layanan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 (<https://www.kompas.com/edu/read/2020/09/15>). Opini-opini terlontar baik positif maupun negatif, terutama persoalan mutu layanan pembelajaran yang diterima oleh peserta didik. Muncul banyak pertanyaan, apakah sekolah dapat mempertahankan mutu layanan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 sebagaimana pembelajaran tatap muka?

Untuk menjawab pertanyaan itu, penulis mencoba meneliti mutu layanan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dari sudut pandang analisis standar pengelolaan sekolah. Hal ini sekaitan dengan apakah permasalahan-permasalahan yang mutakhir tersebut dapat diantisipasi oleh regulasi yang telah disusun oleh pemerintah sebelumnya. Agar lebih fokus, penulis berupaya untuk meneliti potensi-potensi tersebut dari dua sekolah yang dipilih sebagai objek penelitian. Kedua sekolah tersebut adalah SMA Negeri 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi dan SMA 3 Pasundan Bandung.

Upaya ini diharapkan menjadi sebuah khasanah alternatif bagi pengembangan mutu pendidikan di sekolah menengah. Hal ini, terutama berdasarkan kajian bahwa kedua lokus penelitian tersebut telah mengimplementasikan pengelolaan mutu sekolah sesuai dengan SNP yang ada, terutama Standar Pengelolaan, terutama pada masa pandemi COVID-19.

Istilah *Pengelolaan*

sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Wardoyo, 1980). Hal ini sesuai dengan pendapat Harsoyo (1977) yang mengatakan bahwa pengelolaan adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Standar Pengelolaan adalah suatu standar rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan dan bertujuan untuk mengali serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing (Usman, 2009) dan sering kali melukiskannya dalam bentuk kata-kata daripada angka (Mahsun, 2007).

Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa dokumen KTSP dan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Sampel sekolah yang digunakan adalah dua sekolah yakni SMA Negeri 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi dan SMA 3 Pasundan Bandung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis Standar Pengelolaan SMAN 1 Nagrak Kab. Sukabumi

Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada SMA Negeri 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

PPRI No. 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Keduanya mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus mampu mengimplementasikan 8 Standar Nasional Pendidikan yang mencakup: Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengelolaan, *Standar Proses*, *Standar Pengelolaan*, *Standar Pembiayaan*, dan *Standar Penilaian*.

Secara teknis implementasi SNP pada SMA Negeri 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar

Nasional Pendidikan.

Gambaran dari program peningkatan mutu pembelajaran di SMA Negeri 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi dapat dilihat dari kemampuan dan kemauan warga sekolah untuk mengimplementasikan 8 Standar Nasional Pendidikan. Secara keseluruhan implementasi SNP pada SMA Negeri 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan akreditasi A (sangat baik) pada tahun 2020 yakni 97 poin. Hal ini sesuai dengan analisis peneliti terhadap instrumen standar pengelolaan, yang gambarannya dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

Standar Pengelolaan				
N.B	Jwb	SBP	BB	STP
85	A	4	4	16
86	A	4	4	16
87	A	4	4	16
88	A	4	2	8
89	A	4	3	12
90	A	4	4	16
91	A	4	3	12
92	A	4	3	12
93	A	4	3	12
94	A	4	3	12
95	A	4	3	12
96	C	2	4	8
97	A	4	4	16
98	A	4	4	16
99	A	4	4	16
100	A	4	3	12
Jml.			55	212

Gambar 1. Hasil Isian

Keterangan :

N.B = Nomor Butir

Jwb = Ditulis dengan huruf A,B,C,D,

SBP = Skor Butir Perolehan(ditulis dengan angka)

BB = Bobot Butir

STP = Skor Tertimbang perolehan

Jml. = Jumlah

6	Standar Pengelolaan	10	220	212	9,64	96
---	---------------------	----	-----	-----	------	----

Gambar 2. Hasil Perhitungan

Perhitungan Standar Pengelolaan di SMAN 1 Nagrak telah sesuai dengan aplikasi penilaian akreditasi. Jumlah Bobot Komponen sesuai SNP adalah 10 poin. Estimasi Jumlah Skor Tertimbang Maksimum adalah 220 poin. Setelah melalui analisis di SMAN 1 Nagrak, Jumlah Skor Tertimbang Perolehan SMA Negeri 1 Nagrak adalah 212 poin.

Dari data yang ada, Nilai Komponen Akreditasi SMAN 1 Nagrak adalah 9,64 poin. Hal ini diperoleh melalui rumus Perolehan Nilai Komponen Akreditasi yakni Jumlah Skor Tertimbang Perolehan dibagi Jumlah Skor Tertimbang Maksimum dan dikali Jumlah Bobot Komponen. Dengan demikian, angka 9,64 poin adalah hasil dari rumus tersebut. Maka, setelah melalui pembulatan, Skor

Standar Pengelolaan di SMAN 1 Nagrak adalah 96 poin.

Implementasi standar pengelolaan di SMA Negeri 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi tampak pada hasil analisis standar pengelolaan yang mencakup analisis perencanaan program, analisis pelaksanaan rencana kerja, analisis pengawasan dan evaluasi, analisis kepemimpinan sekolah, dan analisis sistem informasi manajemen. Secara konkret, implementasi standar pengelolaan pada SMA Negeri 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi ditunjukkan dengan adanya dokumen proses penyusunan visi dan misi (notulen rapat); rumusan visi dan misi; surat keputusan kepala sekolah tentang penetapan hasil penyusunan visi dan misi; rumusan tujuan sekolah, rencana kerja sekolah (dokumen tertulis

rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan serta bukti sosialisasi kepada warga sekolah/madrasah seperti undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi, surat penyampaian dokumen tertulis rencana kerja jangka menengah (empat tahunan), dan surat penyampaian dokumen tertulis rencana kerja tahunan.

Selain itu, implementasi standar pengelolaan tampak pula pada tersedianya dokumen KTSP, kalender pendidikan/akademik; struktur organisasi sekolah; pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan; peraturan akademik; dan tata tertib sekolah; kode etik sekolah; dan biaya operasional sekolah; serta sistem teknologi informasi yang mendukung manajemen sekolah (Nawawi, 2005). Meskipun belum semuanya dilaksanakan secara maksimal, utamanya terkait dengan pendistribusian tugas yang masih didominasi oleh beberapa orang, tetapi secara umum telah berjalan dengan cukup baik.

B. Hasil Analisis Standar Pengelolaan SMA 3 Pasundan Bandung

Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada SMA 3 Pasundan Bandung mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PPRI No. 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Keduanya mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus mampu mengimplementasikan 8 Standar Nasional Pendidikan yang mencakup: *Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengelolaan, Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian.*

Secara teknis implementasi SNP pada SMA 3 Pasundan Bandung berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Gambaran dari program peningkatan mutu pembelajaran di

SMA 3 Pasundan Bandung dapat dilihat dari kemampuan dan kemauan warga sekolah untuk mengimplementasikan 8 Standar Nasional Pendidikan. Secara keseluruhan implementasi SNP pada SMA 3 Pasundan Bandung sangat baik. Hal ini dibuktikan

dengan perolehan akreditasi A (sangat baik) pada tahun 2020 yakni 95 poin. Hal ini sesuai dengan analisis peneliti terhadap instrumen standar pengelolaan, yang gambarannya dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

Standar Pengelolaan				
N.B	Jwb	SBP	BB	STP
85	A	4	4	16
86	A	4	4	16
87	A	4	4	16
88	A	4	2	8
89	A	4	3	12
90	A	4	4	16
91	A	4	3	12
92	A	4	3	12
93	A	4	3	12
94	B	3	3	9
95	A	4	3	12
96	B	3	4	12
97	A	4	4	16
98	A	4	4	16
99	B	3	4	12
100	A	4	3	12
Jml.			55	209

Gambar 3. Hasil Isian

Keterangan :

N.B = Nomor Butir

Jwb = Ditulis dengan huruf A,B,C,D,E

SBP = Skor Butir Perolehan(ditulis dengan angka)

BB = Bobot Butir

STP = Skor Tertimbang perolehan

Jml. = Jumlah

6	Standar Pengelolaan	10	220	209	9,50	95
---	---------------------	----	-----	-----	------	----

Gambar 4: Hasil Perhitungan

Perhitungan Standar Bandung telah sesuai dengan Pengelolaan di SMA 3 Pasundan aplikasi penilaian akreditasi.

Jumlah Bobot Komponen sesuai SNP adalah 10 poin. Estimasi Jumlah Skor Tertimbang Maksimum adalah 220 poin. Setelah melalui analisis di SMA 3 Pasundan Bandung, Jumlah Skor Tertimbang Perolehan SMA 3 Pasundan Bandung adalah 209 poin.

Dari data yang ada, Nilai Komponen Akreditasi SMA 3 Pasundan Bandung adalah 9,50 poin. Hal ini diperoleh melalui rumus Perolehan Nilai Komponen Akreditasi yakni Jumlah Skor Tertimbang Perolehan dibagi Jumlah Skor Tertimbang Maksimum dan dikali Jumlah Bobot Komponen. Dengan demikian, angka 9,50 poin adalah hasil dari rumus tersebut. Maka, setelah melalui pembulatan, Skor Standar Pengelolaan di SMA 3 Pasundan Bandung adalah 95 poin.

Implementasi standar pengelolaan di SMA 3 Pasundan Bandung tampak pada hasil analisis standar pengelolaan yang mencakup analisis perencanaan program, analisis pelaksanaan rencana kerja, analisis pengawasan dan evaluasi, analisis

kepemimpinan sekolah, dan analisis sistem informasi manajemen (Fattah, 1996). Secara konkret, implementasi standar pengelolaan pada SMA 3 Pasundan Bandung ditunjukkan dengan adanya dokumen proses penyusunan visi dan misi (notulen rapat); rumusan visi dan misi; surat keputusan kepala sekolah tentang penetapan hasil penyusunan visi dan misi; rumusan tujuan sekolah, rencana kerja sekolah (dokumen tertulis rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan serta bukti sosialisasi kepada warga sekolah/madrasah seperti undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi, surat penyampaian dokumen tertulis rencana kerja jangka menengah (empat tahunan), dan surat penyampaian dokumen tertulis rencana kerja tahunan.

Selain itu, implementasi standar pengelolaan tampak pula pada tersedianya dokumen KTSP, kalender pendidikan/akademik; struktur organisasi sekolah; pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan; peraturan akademik; dan tata tertib sekolah;

kode etik sekolah; dan biaya operasional sekolah; serta sistem teknologi informasi yang mendukung manajemen sekolah. Meskipun belum semuanya dilaksanakan secara maksimal, utamanya terkait dengan pendistribusian tugas yang masih didominasi oleh beberapa orang, tetapi secara umum telah berjalan dengan cukup baik.

C. Implementasi Standar Pengelolaan pada Dua SMA yang Telah Diteliti dan Kaitannya dengan Mutu Layanan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada SMA Negeri 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi dan SMA 3 Pasundan Bandung telah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus mampu mengimplementasikan 8 Standar Nasional Pendidikan yang mencakup Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengelolaan, Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian. Setelah melalui kajian dan analisis, secara umum implementasi SNP pada SMA Negeri 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi dan SMA 3 Pasundan Bandung hampir sama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Meskipun letak geografis dan kondisi lingkungan sekolah berbeda, yakni SMA Negeri 1 Nagrak ada di Kabupaten Sukabumi, sedangkan SMA 3 Pasundan berada di Kota Bandung, tetapi baik SMA Negeri 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi, maupun SMA 3 Pasundan Bandung memiliki pengelolaan organisasi yang baik. Terbukti pada kelengkapan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Serta sesuai

dengan konsep teori manajemen George R. Terry, di mana *planning, organizing, actuating*, dan *controlling* yang dibuktikan dengan adanya dokumen RKJM, RKT, KTSP, dan administrasi lainnya. Maka, dengan diterapkannya PJJ ketika masa pandemi COVID-19, kegiatan KBM tidak terganggu secara signifikan dan masih berlangsung dengan cukup kondusif.

2. Proses pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan kurikulum, kesiswaan, dan tenaga kependidikan yang sudah sesuai dengan program yang dibuat. Contohnya yaitu, sudah adanya PPDB, pembinaan prestasi, ekstrakurikuler, dan pedoman peminatan jurusan. Hal ini menjadi faktor penunjang bagi sekolah dalam mengimplementasikan SNP lainnya secara maksimal. Maka, dengan diterapkannya PJJ ketika masa pandemi COVID-19, ada beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian seperti kegiatan ekstrakurikuler, tetapi tidak secara signifikan

mengurangi pelayanan mutu pembelajaran terhadap peserta didik.

3. Kedua sekolah memiliki guru dan tenaga kependidikan yang memadai dan diberdayakan dengan maksimal. Meskipun, ada beberapa guru mengampu mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, tetapi persentasenya sangat kecil. Selain itu, kedua sekolah telah sesuai dengan instrumen Standar Pengelolaan yang meliputi: (1) pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, (2) pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan, (3) pengembangan dan promosi guru dan tenaga kependidikan, (4) penghargaan guru dan tenaga kependidikan. Maka, dengan pemberdayaan SDM yang berorientasi mutu tersebut dapat menjadi pemenuhan syarat PJJ ketika masa pandemi COVID-19, sehingga pendidik dapat menyesuaikan diri ketika harus menggunakan media dan LMS yang telah disiapkan oleh sekolah.

4. Pada implementasi standar pembiayaan antara sekolah negeri dan swasta tidak ada perbedaan

yang mendasar dalam pengelolaannya. Hal ini tampak dari cara kedua sekolah dalam melakukan analisis dan penyusunan RKAS/RAPBS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan kondisi pandemi COVID-19 yang dihadapi.

IV. KESIMPULAN

Dari kajian dan analisis yang dilakukan penulis, SMAN 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi

dan SMA 3 Pasundan Bandung mendapatkan poin yang maksimal. Hal tersebut dapat digunakan sebagai indikator pengelolaan mutu layanan pembelajaran secara baik meskipun dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19. Meski demikian, diperlukan penelitian lanjutan yang melihat mutu layanan pembelajaran dari instrumen akreditasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Berlian, Ujang Cepi. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Aghniya Ilma.
- Depdiknas. (2010). *Manajemen Berbasis Sekolah*. www.mgp-be.depdiknas.go.id. Diakses dari alamat www.mgp-be.depdiknas.go.id/cms/upload/publikasi/m01u02a.pdf.
- Fattah, Nanang. (1996). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Harsoyo. (1977). *Manajemen Kinerja*. Persada, Jakarta.
- Kerr, David. (1999). *Citizenship Education: An International Comparison*. England: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Mulyasa. (2012). *Praktek Penelitian Tindakan Kelas*. 2012. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahsun. (2005). *Metodologi Penelitian Bahasa: Tahap Strategi, Metode dan Tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. (2005). *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Pers
- Sallis, Edward. (2006). *Alih Bahasa Ali riyadi, Ahmad & Fahrurozi. Total Quality Management in Education*. Yogyakarta: Irchisod.

Usman, Husaini. (2009). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wardoyo. (1980). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.